

**KERANGKA ACUAN KERJA
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN
PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

I. INFORMASI PERENCANAAN

OPD	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sasaran Program	:	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Indikator Program	:	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Target Program	:	100 %
Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Indikator Kegiatan	:	Terlaksananya Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
Target Kegiatan	:	2 Dokumen
Sub Kegiatan	:	Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
Sasaran Sub Kegiatan	:	Pelajar SLTA Kota Bekasi
Indikator Sub Kegiatan	:	Laporan Hasil Pembinaan Aktifitas Kepaskibraaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka
Target Sub Kegiatan	:	2 Dokumen
Prioritas Pembangunan Kota	☐	"link and match" pemuda melalui program pemagangan dan penempatan kerja dengan dunia usaha
	☐	Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
	☐	Peningkatan "urban farming"
	☐	Pengembangan kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata lokal
	☐	Pengentasan kemiskinan
	☐	Pengentasan rumah tidak layak huni (rutilahu)
	☐	Implementasi saving land/land banking dalam rangka pemenuhan sarana prasarana perkotaan
	☒	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	☐	Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan
	☐	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

	☐	Penurunan prevalensi stunting
	☐	Peningkatan responsif gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	☐	Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR)
	☐	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
	☒	Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
Prioritas Pembangunan Provinsi :	☐	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya
	☐	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
	☒	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama
	☐	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
	☐	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
	☐	Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitas Politik, Hukum, HAM dan Keamanan
Prioritas Pembangunan Nasional :	☐	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
	☐	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	☐	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	☐	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	☐	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	☐	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
	☒	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Tagging SDG's :	☐	Penanggulangan Kemiskinan
	☐	Mengakhiri Kelaparan
	☐	Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
	☐	Pendidikan Berkualitas
	☐	Kesetaraan Gender
	☐	Akses Air Bersih dan Sanitasi
	☐	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
	☐	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	☐	Mengurangi Ketimpangan
	☐	Kota dan Komunitas Berkelanjutan
	☐	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
	☐	Penanganan Perubahan Iklim
	☐	Menjaga Ekosistem Darat
	☒	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat
	☐	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tagging SPM :	1.	Pendidikan
	☐	a. Pendidikan Dasar Usia Dini.
	☐	b. Pendidikan Dasar.
	☐	c. Pendidikan Kesetaraan.
	2.	Kesehatan
	☐	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.
	☐	b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.
	☐	c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.
	☐	d. Pelayanan Kesehatan Balita.
	☐	e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar.
	☐	f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.
	☐	g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut.
	☐	h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.
	☐	i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.
	☐	j. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis.
	☐	k. Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa berat.
	☐	l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV).
	3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	☐	a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari.
	☐	b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
	4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
	☐	a. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota.
	☐	b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kota.
	5.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
	☐	a. Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
	☐	b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
	☐	c. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
	☐	d. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana.
	☐	e. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran.
	6.	Sosial
	☐	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti.
	☐	b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti.
	☐	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Diluar Panti

	☐	d.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti.
	☐	e.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kota.
Tagging Kemiskinan Ekstrem	☐	a.	Mengurangi Beban Pengeluaran
	☐	b.	Meningkatkan Pendapatan
	☐	c.	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan

II. INFORMASI PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memegang teguh PANCASILA dan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya Peningkatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta menolak paham lain selain Pancasila, mencegah segala bentuk Radikalisme dan Terorisme, Peningkatan Keberagaman Bhineka Tunggal Ika

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;

9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025
11. Surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 000.7.2.4/2102/Bappelitbangda.AP4EP tanggal 21 Maret 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Input Pra RKA pada SIPD RI.

C. MAKSUD

Memberikan pembekalan dan pengembangan kepada anggota Purna Paskibra agar tetap memiliki semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.

D. TUJUAN

Menjaga tali silaturahmi antar anggota serta memperkuat rasa kebersamaan dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa, serta menjadi teladan bagi generasi muda lainnya.

E. DESKRIPSI SUB KEGIATAN

1. Pelatihan dan Pembekalan
Kegiatan dimulai dengan sesi pelatihan yang mencakup penguatan nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, dan keterampilan organisasi. Pelatihan ini sering kali melibatkan narasumber yang berpengalaman dalam bidang kepemudaan dan kebangsaan.
2. Diskusi dan Pertukaran Pengalaman
Forum diskusi diadakan untuk membahas pengalaman selama bertugas sebagai Paskibraka, berbagi tantangan, serta solusi yang ditemukan. Ini juga menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi antar anggota.
3. Kegiatan Olahraga dan Rekreasi
Untuk menjaga kebugaran fisik dan mental, kegiatan olahraga seperti hiking, permainan tim, atau kegiatan outdoor lainnya sering dilaksanakan. Ini juga berfungsi untuk mempererat hubungan antar anggota.
4. Pengenalan Kepemimpinan
Anggota diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui berbagai simulasi dan latihan. Mereka dilatih untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab dalam kegiatan yang mereka lakukan.
5. Penutupan dan Pengukuhan
Pengukuhan yang menandai komitmen anggota Purna Paskibraka untuk meneruskan nilai-nilai yang diperoleh dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

F. PENERIMA MANFAAT

- ☒ Laki-laki
- ☒ Perempuan
- ☐ Anak-anak
- ☐ Lansia
- ☐ Difabel
- ☐ Lainnya

Ket : ceklist

G. MEKANISME DAN RANCANGAN SUB KEGIATAN

1. Menginformasikan kepada semua anggota Purna Paskibraka tentang kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Pelaksanaan
 - Mengadakan upacara pembukaan untuk memotivasi peserta dan menjelaskan agenda kegiatan.
 - Melaksanakan berbagai sesi sesuai dengan rencana, seperti pelatihan, diskusi, dan kegiatan sosial.
 - Memastikan setiap sesi berjalan dengan baik dan sesuai jadwal.
3. Evaluasi
 - Mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - Menyusun laporan kegiatan yang mencakup hasil, tantangan, dan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya.
4. Penutupan

Mengadakan upacara penutupan untuk memberikan penghargaan kepada peserta dan mendeklarasikan komitmen mereka untuk meneruskan nilai-nilai yang telah dipelajari.

H. INDIKATOR KEBERHASILAN SUB KEGIATAN

1. Umpan Balik Peserta
 - Tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan, yang dapat diukur melalui kuesioner atau diskusi kelompok setelah kegiatan.
 - Respon peserta mengenai materi yang disampaikan dan relevansinya dengan kebutuhan mereka.
2. Peningkatan Keterampilan
 - Penilaian terhadap peningkatan keterampilan yang diperoleh peserta, baik dalam aspek kepemimpinan, kerja sama, maupun keterampilan praktis lainnya.
 - Observasi langsung saat kegiatan simulasi atau diskusi kelompok.
3. Komitmen Berkelanjutan
 - Kesiediaan peserta untuk terlibat dalam kegiatan lanjutan atau program-program Purna Paskibraka di masa depan.
 - Pengembangan rencana tindak lanjut yang melibatkan peserta dalam kegiatan masyarakat.

I. RENCANA LOKASI SUB KEGIATAN

Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa.

J. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN PRA RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

RKA (Terlampir)

K. KELENGKAPAN PENDUKUNG

L RENCANA PELAKSANAAN

Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

NO	TAHAPAN	BULAN											
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Penyusunan RKA dan KAK												
2	Asistensi RKA												
3	Pembahasan RKA												
4	Pengesahan RKA												
5	Pelaksanaan Kegiatan												

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,


NESAN SUJANA, ST. MT. CGCAE
Pembina Tk.I / V.b
NIP. 19740708 200212 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA SATKER / SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NAMA PA/KPA/PPK : Drs. HUDI WIJAYANTO, M.Si

NAMA SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KOTA BEKASI (FORKOPIMDA)

NAMA PEKERJAAN : BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA (EO)
KEGIATAN ROADSHOW FORKOPIMDA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : BELANJA JASA EO (ROADSHOW) FORKOPIMDA KOTA BEKASI

A. LATAR BELAKANG

Kota Bekasi merupakan kota penyangga Ibu Kota Negara, yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Kota Bekasi menjadi Kota satelit dengan jumlah penduduk 2.644.056 jiwa (data pertengahan tahun 2024). Kota Bekasi adalah Kota yang sangat heterogen, bermacam-macam suku, budaya, agama, etnis semua ada di Kota Bekasi. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Bagaimana cara menjaga kondusifitas agar terciptanya keamanan dan ketertiban di Kota Bekasi. Forkopimda Kota Bekasi yang diharapkan untuk selalu bersinergi dan menyelaraskan visi misi dan rencana pembangunan pemerintah daerah sehingga ada kesesuaian program. Forkopimda memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan pola hubungan yang harmonis antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan program kebijakan prioritas pemerintah, pembangunan nasional, menjalin iklim investasi yang kondusif, memelihara stabilitas politik dan keamanan di daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah forum yang bertujuan untuk memaksimalkan koordinasi antar unsur-unsur pimpinan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah. Forkopimda digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah.

C. TARGET/SASARAN

Target dari kegiatan ini adalah masyarakat yang ada di Kota Bekasi.

D. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan :
Instansi : Pemerintah Kota Bekasi
Satuan Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PPK : Drs. HUDI WIJAYANTO, M.Si

E. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai bersumber dari dana APBD Pemerintah Kota Bekasi TA 2025

Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah

Pagu Paket : Rp. 409.700.000,-

Pagu HPS : Rp. 178.380.000,-

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini selama 4 (empat) hari kalender dimulai setelah diterimanya Surat Perintah Kerja (SPK).

G. SPESIFIKASI TEKNIS

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
	5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1 Paket	Rp.409.700.000
1	Belanja EO Roadshow Forkopimda		Orang/hr
	- Jamuan Makan dan Minuman Peserta dan Panitia	130	Pack
	- Jamuan Snack Peserta dan Panitia	130	Pack
	- Jamuan Nampun	4	Buah
	- Jamuan Parcel	4	Buah
	- Spanduk Kegiatan	13	Buah

Syarat kualifikasi peserta

1. Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi:
 - a. Memiliki izin usaha (SIUP) Kecil
 - b. Memiliki KBLI 82302 Bidang Event Organizer;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan /NIB ;
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan Tahun 2024), KSWP yang sudah terverifikasi;
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk
- g. Pakta Integritas;
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
2. Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :
 - 1) Memiliki pengalaman:
 - a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- l. Syarat Teknis peserta
 - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan;
 - b. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang.

Bekasi, Oktober 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. HUDI WIJAYANTO, M. SI
Pembina Utama Muda/VI.c
NIP. 19690121199007 1 001

**KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA)**

HARI/TANGGAL	WAKTU	ACARA	MATERI	KET
Rabu, 15 Oktober 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Jatisampurna	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 - 11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Jatisampurna	
	11.00 - 12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Jatisampurna	
Kamis, 16 Oktober 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Pondok Melati	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 - 11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Pondok Melati	
	11.00 - 12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Pondok Melati	
Rabu, 22 Oktober 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Pondok Gede	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 - 11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Pondok Gede	
	11.00 - 12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Pondok Gede	

HARI/TANGGAL	WAKTU	ACARA	MATERI	KET
Kamis, 23 Oktober 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Jati Asih	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 - 11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Jati Asih	
	11.00 - 12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Jati Asih	
Rabu, 29 Oktober 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Bantargebang	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 - 11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Bantar Gebang	
	11.00 - 12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Bantar Gebang	
Kamis, 30 Oktober 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Mustikajaya	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 - 11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Mustika Jaya	
	11.00 - 12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Mustika Jaya	

**KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA)**

HARI/TANGGAL	WAKTU	ACARA	MATERI	KET
Rabu, 05 November 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Rawalumbu	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 - 11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Rawalumbu	
	11.00 - 12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Rawalumbu	
Kamis, 06 November 2025	08.30 – 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Bekasi Selatan	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 -11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Bekasi Selatan	
	11.00 -12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Bekasi Selatan	
Rabu, 12 November 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Bekasi Barat	09.00 – 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 -11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Bekasi Barat	
	11.00 -12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Bekasi Barat	

HARI/TANGGAL	WAKTU	ACARA	MATERI	KET
Kamis, 13 November 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Medan Satria	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 -11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Medan Satria	
	11.00 -12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Medan Satria	
Rabu, 19 November 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Bekasi Utara	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 -10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 -11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Bekasi Utara	
	11.00 -12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Bekasi Utara	
Kamis, 20 November 2025	08.30 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta		Panitia
Kecamatan Bekasi Timur	09.00 - 09.30 WIB	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	09.00 - 10.00 WIB	Sambutan Forkopimda		
	10.10 -11.00 WIB	Narasumber 1	Kapolsek Bekasi Timur	
	11.00 -12.00 WIB	Narasumber 2	Danramil Bekasi Timur	

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR)
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA
DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA FASILITASI
KERUKUNAN UMAT BERAGAM DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Program	:	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
IK Program (out Come)	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
Nama Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Nama Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
IK Keluaran	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 700 orang
IK Hasil	:	Terlaksananya kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 900 orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 8) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

B. Gambaran Umum

a. Latar Belakang

Kota Bekasi merupakan kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, memiliki tingkat kepadatan penduduk dan keberagaman agama, suku, ras, dan golongan yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi menjadi tempat tinggal kaum urban yang memiliki ragam budaya dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Disisi lain semakin beragamnya penduduk yang tinggal di Kota Bekasi maka semakin bervariasi pula interaksi sosial, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan kegiatan budaya yang harus diakomodasi. Namun demikian, keberagaman yang ada saat ini perlu difasilitasi dan dikendalikan melalui suatu kebijakan publik yang berdampak pada terciptanya hubungan antar masyarakat yang harmonis dan kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif.

Keberhasilan pembangunan di Kota Bekasi tidak terlepas dari kondisi stabilitas politik serta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Situasi ini pada hakekatnya akan dapat tercapai apabila adanya upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Unsur yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kerukunan. Kerukunan itu merupakan sebuah keseimbangan social dalam masyarakat, di mana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik. Terciptanya kondisi seperti ini memang tidak mudah untuk dipertahankan dalam waktu lama. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, pertikaian akibat ketidak rukunan masyarakat sulit dihindari. Pertikaian bisasa jadi sebabkan oleh banyak factor kepentingan yang mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberagaman suku, ras, budaya, dan agama di Indonesia juga dapat menjadi pemicu timbulnya pertikaian. Oleh karena itulah diperlukan sikap toleransi, kesabaran, dan kerendahan hati dalam hidup bermasyarakat. Kerukunan hendaknya dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Bila sikap toleransi sudah dibiasakan dan dijunjung tinggi dalam keluarga, tentunya akan berimbas dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian halnya dalam menciptakan kerukunan beragama. Kerukunan antar umat beragama penting untuk mewujudkan kesatuan pandangan dalam bersikap, bertindak, serta bertanggungjawab dan menyadari bahwa masyarakat dan negara adalah milik bersama.

Kota Bekasi merupakan daerah yang kompleks, letaknya berdekatan dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Urbanisasi penduduk dengan diikuti aktivitas perekonomian yang padat dan munculnya berbagai permukiman baru serta polarisasi penggunaan lahan apabila dikaitkan dengan keberagaman beragama menjadi Kota Bekasi merupakan sebuah tipologi daerah urban yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Kota Bekasi sebagai daerah penyangga di sebelah Timur pintu gerbang ibukota DKI Jakarta merupakan daerah yang kompleks dengan beragama. Hal ini terlihat dari karakteristik wilayah yang dominan dengan munculnya berbagai permukiman dan perumahan. Kondisi ini menjadikan kota Bekasi sebagai daerah yang majemuk baik secara ekonomi social budaya dan agama termasuk didalamnya kompleksitas permasalahan.

Sementara permasalahan kota Bekasi selain masalah toleransi juga Maraknya tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kota Bekasi menyebabkan diperlukannya sosialisasi terkait pemahaman narkoba. Pemerintah Daerah yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program pemerintah pusat tentunya harus sinergi pula dalam hal pengaturan. Demikian pula pentingnya program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di tingkat pusat, harus diatur dan disesuaikan pula pada tingkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik pada tataran pemerintahan daerah

Oleh karena itu perlu ada upaya dan program agar menjadikan Kota Bekasi kota yang toleran, aman, nyaman dan terhindar dari perkembangan penyalahgunaan narkoba.

b. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh pendidikan, pelajar dan Pemerintah Kota Bekasi.

c. Strategi Pencapaian Keluaran (Output)

1. Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Metode Pengadaan Barang/Jasa : kontraktual atau swakelola

2. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yaitu :

- a. Sinergitas program pemerintah dengan masyarakat berkaitan dengan pemahaman toleransi, radikalisme dan HAM dilakukan dengan road show.
- b. Peningkatan pemahaman pelajar terhadap toleransi dan bahaya narkoba melalui cerdas cermat.
- c. peningkatan pemahaman pelajar terhadap bahaya narkoba melalui kegiatan sosialisasi
- d. melakukan pengukuran indek toleransi sebagai indikator kinerja pemerintah

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1. Persiapan

- a. Rapat Intern Bidang
- b. Menentukan Hari, tanggal pelaksanaan
- c. Menyusun permohonan tempat, Undangan Peserta dan Undangan Narasumber
- d. Menyusun Jadwal Acara
- e. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan ke instansi terkait.

2. Pelaksanaan

Bulan/Tahapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan:												
1) Focus Group Discussion Pemerintah dengan Tokoh Masyarakat di Kota Bekasi												
2) Sosialisasi P4GN												
3) Cerdas Cermat/Lomba tentang toleransi dan Narkoba												
4) Pengukuran indeks toleransi												
Pelaksanaan:												
1) Focus Group Discussion Pemerintah dengan Tokoh Masyarakat di Kota Bekasi												
2) Sosialisasi P4GN												
3) Cerdas Cermat tentang toleransi dan Narkoba												
4) Pengukuran indeks toleransi												
Pelaporan :												
Pertanggungjawaban Keuangan												
Kinerja Kegiatan												

- Membuat Surat Perintah Kerja bagi pihak ketiga yang ditetapkan
- Membuat Surat Pesanan
- Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan
- Melakukan Serah Terima Barang
- Membuat Nota Dinas Pencairan, SPP dan SPM

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud kegiatan

- Kegiatan Sinergitas program pemerintah dengan Kemasyarakatan adalah untuk memberikan Pemahaman terkait pentingnya toleransi dan bahaya pemahaman radikalisme yang bisa muncul tidak hanya berkaitan dengan ideologi akan tetapi juga dampak dari kesenjangan ekonomi, sosial budaya yang dikemas dengan agama.
- Selain itu juga untuk memberikan pemahaman kepada pelajar akan bahaya narkoba bagi masa depan.
- Melakukan pengukuran terhadap indeks toleransi di Kota Bekasi

Tujuan Kegiatan

Sinergitas Tokoh Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah adalah:

- Meningkatkan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan Nasional dan Daerah.
- Mengembangkan rasa gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- Menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- Tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

a. Gambaran umum mengenai keluaran (Output) kegiatan

1. Sinergitas Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) dan Program Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
2. Pelaksanaan Sosialisasi P4GN kepada Pelajar
3. Cerdas Cermat Pelajar SLTP dan SLTA terkait pemahaman terhadap toleransi dan Narkoba
4. Melakukan pengukuran indeks toleransi di Kota Bekasi.

b. Volume/targetnya yang akan datang

Sinergitas Tokoh Agama dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali pelaksanaan Kegiatan dengan peserta terdiri dari Tokoh Agama di Kota Bekasi.

Target yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah :

- a. Peserta Focus Group Discussion Pemerintah dengan Tokoh masyarakat di Kota Bekasi dilaksanakan 8 angkatan dalam satu sub kegiatan, menghadirkan 900 orang peserta.
- b. Peserta Program Pelaksanaan sosialisasi P4GN kepada pelajar sebanyak 700 orang
- c. Peserta lomba orasi/pidato/lomba utusan dari sekolah.

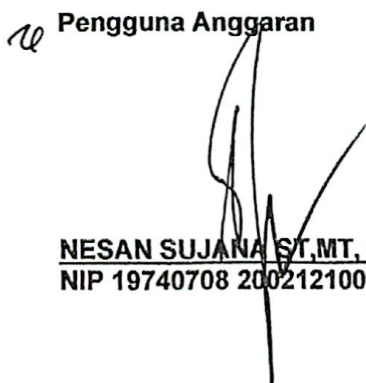
c. Lokasi pelaksanaan kegiatan/lokasi output yang dihasilkan/lokasi penerima manfaat atas output yang dihasilkan

Kegiatan ini dilakukan di Kota Bekasi:

1. untuk kegiatan focus group diskusi 8 angkatan
2. untuk kegiatan P4GN dilakukan di wilayah Kota Bekasi
3. langkah kegiatan yang dilakukan:
 - a. Menyusun dokumentasi kegiatan
 - b. Menyusun laporan kegiatan
 - c. Melaporkan hasil kegiatan

D Biaya yang diperlukan

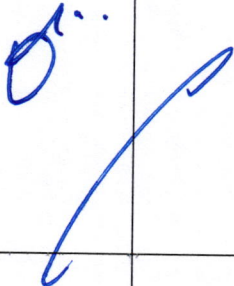
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Program Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. dibebankan pada APBD Kota Bekasi Tahun 2025 senilai Rp. 1.066.848.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)

 **Pengguna Anggaran**

NESANA SUJANA ST.MT, CGCAE
NIP 19740708 2002121007

LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RKA SKPD
PADA APBD KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : Kesatuan Bangsa dan Politik
JUDUL KEGIATAN : Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
JUDUL SUB KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
PAGU SUB KEGIATAN : Rp9.868.672.000,00
SUMBER DANA : PAD

NO.	CATATAN	NAMA DAN PARAF
1.	BAPPELITBANGDA <i>Lanjutan 4/3/25</i>	
2.	BPKAD BIDANG ANGGARAN : <i>Lanjutan 4/3/25</i>	
3.	BAGIAN PEMBANGUNAN <i>Lanjutan</i>	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.868.672.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100 %	Capaian Program	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.479.773.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.868.672.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen
Hasil	: Terlaksananya Pembinaan Politik Daerah Terlaksananya Pembinaan Politik Daerah	100 % 100 %	Hasil	: Terlaksananya Pembinaan Politik Daerah Terlaksananya Pembinaan Politik Daerah	100 % 100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					14.479.773.200,00					9.868.672.000,00	-4.611.101.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					14.479.773.200,00					9.868.672.000,00	-4.611.101.200,00
5.1.05	Belanja Hibah					14.479.773.200,00					9.868.672.000,00	-4.611.101.200,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat					5.191.893.200,00					580.792.000,00	-4.611.101.200,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat					5.191.893.200,00					580.792.000,00	-4.611.101.200,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat					5.191.893.200,00					580.792.000,00	-4.611.101.200,00
	[#] Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					5.191.893.200,00					580.792.000,00	-4.611.101.200,00
	[-] Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat					5.191.893.200,00					580.792.000,00	-4.611.101.200,00
	Penerima Hibah : Bawaslu Kota Bekasi Alamat : Jl. Mataram I No. 22 RT 004/003	1 Tahun	Tahun -	2.191.893.200,00	-	2.191.893.200,00	1 Tahun	Tahun -	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-1.941.893.200,00
	Penerima Hibah : KPUD Kota Bekasi (Jl. Ir. H. Juanda No.163 RT.004 RW. 001) Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.163 RT.004 RW. 001 17112	1 Tahun	Tahun -	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	1 Tahun	Tahun -	330.792.000,00	-	330.792.000,00	-2.669.208.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					9.287.880.000,00					9.287.880.000,00	0,00	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					9.287.880.000,00					9.287.880.000,00	0,00	
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					9.287.880.000,00					9.287.880.000,00	0,00	
	[#] Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					9.287.880.000,00					9.287.880.000,00	0,00	
	[-] Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					9.287.880.000,00					9.287.880.000,00	0,00	
	Penerima Hibah : DPC PARTAI DEMOKRAT KOTA BEKASI Alamat : Ruko Bekasi Town Square Block I/8	75029 Surat	Surat -	7.500,00	-	562.717.500,00	75029 Surat	Surat -	7.500,00	-	562.717.500,00	0,00	
	Penerima Hibah : DPD Partai Amanat Nasional Alamat : JL. Raya Siliwangi KM.05 Blok RA 09 Pasar Segar Rawalumbu Kota Bekasi	97683 Surat	Surat -	7.500,00	-	732.622.500,00	97683 Surat	Surat -	7.500,00	-	732.622.500,00	0,00	
	Penerima Hibah : Partai Gerindra (alamat : Ruko Pasar Segar No. RA.2) Alamat : Ruko Pasar Segar No. RA.2	156776 Surat	Surat -	7.500,00	-	1.175.820.000,00	156776 Surat	Surat -	7.500,00	-	1.175.820.000,00	0,00	
	Penerima Hibah : Partai Golkar (alamat : Jl. Raya Pekayon Jaya No.9 Rt.003/001) Alamat : Jl. Raya Pekayon Jaya No.9 Rt.003/001	205229 Surat	Surat -	7.500,00	-	1.539.217.500,00	205229 Surat	Surat -	7.500,00	-	1.539.217.500,00	0,00	
	Penerima Hibah : Partai PDI Perjuangan (alamat : Jl. Chairil Anwar No.3 Margahayu Bekasi Timur) Alamat : Jl. Chairil Anwar No.3 Margahayu Bekasi Timur	201831 Surat	Surat -	7.500,00	-	1.513.732.500,00	201831 Surat	Surat -	7.500,00	-	1.513.732.500,00	0,00	
	Penerima Hibah : Partai PKB (alamat : Ruko Sentra Niaga Kalimalang Jl. Jend. A. Yani Blok A2 No.07) Alamat : Ruko Sentra Niaga Kalimalang Jl. Jend. A. Yani Blok A2 No.07	82544 Surat	Surat -	7.500,00	-	619.080.000,00	82544 Surat	Surat -	7.500,00	-	619.080.000,00	0,00	
	Penerima Hibah : Partai PKS (alamat : Jl. KH. Noer Ali Selatan Kav. 7 Rt. 12/11 Jaka Setia Bekasi Selatan) Alamat : Jl. KH. Noer Ali SelatanKav. 7 Rt. 12/11 Jaka Setia Bekasi Selatan	296139 Surat	Surat -	7.500,00	-	2.221.042.500,00	296139 Surat	Surat -	7.500,00	-	2.221.042.500,00	0,00	
	Penerima Hibah : Partai PPP (alamat : Jl. Chairil Anwar No.1) Alamat : Jl. Chairil Anwar No.1	58518 Surat	Surat -	7.500,00	-	438.885.000,00	58518 Surat	Surat -	7.500,00	-	438.885.000,00	0,00	
	Penerima Hibah : Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi Alamat : Perum Alinda Kencana 1	64635 Surat	Surat -	7.500,00	-	484.762.500,00	64635 Surat	Surat -	7.500,00	-	484.762.500,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						14.479.773.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					9.868.672.000,00	-4.611.101.200,00

Kota Bekasi, 2 September 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Nesnan Sujana, S.T.,M.T., CRP., CRMP
NIP. 197407082002121007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. DINAR FAIZAL BADAR	197101151990031002	Kepala BAPPELITBANGDA	
2	RULLY CHAIRUL, S.E., M.A	198005082006041018	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	
3	SAUT HUTAJULU, A.Md. LLAJ, S.E., M.Si.	197110251996031003	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	

KERANGKA ACUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NAMA PROGRAM	:	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
IK PROGRAM (OUTCOME)	:	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah : 100%
NAMA KEGIATAN	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
SUB KEGIATAN	:	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik
INDIKATOR KELUARAN	:	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun: 11 Dokumen
INDIKATOR HASIL	:	• Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah: 2.400 Orang • Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah: 10 Laporan • Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah: 10 Dokumen

A. Latar Belakang

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Daerah di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Daerah di Kota Bekasi;
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02.A Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang telah diubah oleh Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 02.A Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- 14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
- 15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

Gambaran Umum

- Kegiatan operasional non-pemilihan pada sekretariat KPU Kota Bekasi dan Bawaslu Kota Bekasi yang diberikan melalui hibah daerah berupa uang terdapat efisiensi sehingga mengubah besaran anggaran pada APBD-P TA. 2025.

Maksud dan Tujuan

Melaksanakan amanah Permendagri berupa bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik, operasional partai politik di Kota Bekasi, Hibah Pilkada kepada KPU Kota Bekasi.

Keluaran (output) Kegiatan

- 1. Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan 9 Partai Politik
- 2. Jumlah lembaga yang mendapat bantuan dana hibah 2 Lembaga

Lokasi pelaksanaan kegiatan / lokasi output yang dihasilkan Kota Bekasi

B. PENERIMA MANFAAT

Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN (OUTPUT)

- 1. Metode Pelaksanaan
 - a. Metode Pengadaan Barang / Jasa Kontraktual

Swakelola	
Paket Pekerjaan	
Lainnya	✓

Ket: metode pengadaan bertanda ✓ adalah yang digunakan

- b. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Fisik				
Sosialisasi / Bimtek / Workshop				
Pengujian Laboratorium				
Kajian / Analisa / Perencanaan				
Jaringan IT				
Pengawasan / Penertiban				
Pelayanan Kesehatan / Pendidikan /				
Kebersihan				
Lainnya	✓			

Ket: metode pelaksanaan bertanda ✓ adalah yang digunakan

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan

	TAHAPAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bobot (%)	Keluaran
Persiapan															
1.	Rapat Persiapan	✓	✓											10.00	
2.	Koordinasi dengan stakeholder	✓	✓											10.00	Koordinasi dengan pengurus Partai Politik dan Lembaga Vertikal
Pelaksanaan															
1.	Pelaksanaan Bantuan Parpol dan Penerima Hibah Uang			✓	✓	✓								40.00	Tingkat pemahaman tentang Pendidikan Politik
Pelaporan															
1.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan							✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.00	Dokumen Laporan Penggunaan dana APBD T.A. 2025

b. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.

D. PERKIRAAN ANGGARAN BIAYA DAN SUMBER DANA

a. Perkiraan Anggaran Rp9.868.672.000,00 Terbilang: Sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah.

b. Sumber Dana

PAD / DDL	✓
Dana Alokasi Khusus	
Dana Alokasi Umum	
Dana Insentif Daerah	
Bantuan Provinsi DKI Jakarta	
Bantuan Provinsi Jawa Barat	
DANA JKN	

Ket: jenis sumber dana bertanda ✓ adalah yang digunakan.

PENGGUNA ANGGARAN

NESAN SUJANA, S.T, M.T, CRP, CRMP, CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19740708 200212 1 007

LEMBAR VERIFIKASI RKA SKPD PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
 JUDUL KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 JUDUL SUB KEGIATAN : Pelaksanaan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 PAGU SUB KEGIATAN : 5.00.000.000,.
 SUMBER DANA : ~~Pendapatan Asli Daerah (PAD)~~

NO.	CATATAN	NAMA DAN PARAF
1.	BAPPELITBANGDA <i>Lanjutkan 8/3/2025</i>	
2.	BPKAD BIDANG ANGGARAN : - <u>Pedoman</u> surat edaran terkait efisiensi - lampirkan ^{SE} gubernur terkait pelaksanaan kes. ini <u>3/3</u> lanjutkan	
	BIDANG ASET	
3.	BAPENDA (Hanya RKA pendapatan)	
4.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN - Koordinasikan dg PBJ - konsep pelaksanaan kegiatannya ingin seperti apa? - Untuk TA 2026, kegiatan yg sama utk berkoordinasi dulu dgn AdBang	<i>Lanjutkan</i> 
5.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	Capaian Program	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 896.130.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	85 Orang
Hasil	: Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 % 100 %	Hasil	: Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 % 100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					896.130.000,00					500.000.000,00	-396.130.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					896.130.000,00					500.000.000,00	-396.130.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					896.130.000,00					500.000.000,00	-396.130.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					125.616.500,00					269.782.500,00	144.166.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					125.616.500,00					269.782.500,00	144.166.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					4.410.000,00					1.953.000,00	-3.357.000,00
	[#] Belanja Bahan bakar Pelumas pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.470.000,00					0,00	-1.470.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Pelumas untuk Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA					1.470.000,00					0,00	-1.470.000,00
	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK : Spesifikasi : Kota Bekasi ke Bandung/Cimahi/ Sukabumi	2 pp	Kal	735.000,00	-	1.470.000,00	0 pp	Kal	735.000,00	-	0,00	-1.470.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Pelumas bagi Pembinaan Pembentukan Karakter Bangsa bagi Ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					735.000,00					0,00	-735.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Pelumas pada Kegiatan Pembentukan Karakter Bangsa bagi Ormas					735.000,00					0,00	-735.000,00
	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK : Spesifikasi : Kota Bekasi ke Bandung/Cimahi/ Sukabumi	1 pp	Kal	735.000,00	-	735.000,00	0 pp	Kal	735.000,00	-	0,00	-735.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Pelumas pada Kegiatan Duta Bela Negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.470.000,00					0,00	-1.470.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Bahan Bakar Pelumas pada Kegiatan Duta Bela Negara					1.470.000,00					0,00	-1.470.000,00
	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK : Spesifikasi : Kota Bekasi ke Bandung/Cimahli/ Sukabumi	2 pp	Kali	735.000,00	-	1.470.000,00	0 pp	Kali	735.000,00	-	0,00	-1.470.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Pelumas pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					735.000,00					0,00	-735.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Pelumas pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA					735.000,00					0,00	-735.000,00
	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK : Spesifikasi : Kota Bekasi ke Bandung/Cimahli/ Sukabumi	1 pp	Kali	735.000,00	-	735.000,00	0 pp	Kali	735.000,00	-	0,00	-735.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Kegiatan Pendidikan Karakter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.053.000,00	1.053.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Pelumas Kegiatan Pendidikan Karakter					0,00					1.053.000,00	1.053.000,00
	Belanja Bahan Bakar Pertalite Spesifikasi : Belanja bahan Bakar Pertalite	-	Liter	0,00	-	0,00	81 Liter	Liter	13.000,00	-	1.053.000,00	1.053.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					0,00					8.330.000,00	8.330.000,00
	[#] Belanja Topi Peserta Pendidikan Karakter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					8.330.000,00	8.330.000,00
	[-] Belanja Topi Peserta Pendidikan Karakter					0,00					8.330.000,00	8.330.000,00
	Topi Rimba Spesifikasi : Topi Rimba	-	Buah	0,00	-	0,00	85 Buah	Buah	98.000,00	-	8.330.000,00	8.330.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					5.500.500,00					5.154.500,00	-346.000,00
	[#] Belanja Foto Cofy Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.554.500,00	1.554.500,00
	[-] Belanja Foto Cofy Kegiatan					0,00					1.554.500,00	1.554.500,00
	Foto Copy HVS A4/Quarto 80 gram Spesifikasi : Foto Copy HVS A4/Quarto 80 gram	-	Lembar	0,00	-	0,00	6218 Lembar	Lembar	250,00	-	1.554.500,00	1.554.500,00
	[#] Belanja Foto Cofy Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					460.500,00					0,00	-460.500,00
	[-] Belanja Foto Cofy Kegiatan					460.500,00					0,00	-460.500,00
	Foto Copy HVS F4/Folio 70 gram Spesifikasi : Foto Copy HVS F4/Folio 70 gram	1535 Lembar	Lembar	300,00	-	460.500,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-460.500,00
	[#] Belanja cetak Spanduk pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	[-] Belanja Alat/ bahan Cetak spanduk Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	12 M	M2	90.000,00	-	1.080.000,00	0 M	M2	90.000,00	-	0,00	-1.080.000,00
	[#] sewa ruangan pertemuan kegiatan Pendidikan karakter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.800.000,00	1.800.000,00
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan Pendidikan Karakter					0,00					1.800.000,00	1.800.000,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	-	M2	0,00	-	0,00	20 Meter	M2	90.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00
	[#] Belanja Alat/ bahan cetak Spanduk pada Kegiatan Pembinaan Bela bagi SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	[-] Belanja Alat/ bahan Cetak spanduk Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	Spanduk Spesifikasi : Sapnduk	12 Meter	M2	90.000,00	-	1.080.000,00	0 Meter	M2	90.000,00	-	0,00	-1.080.000,00
	[#] belanja alat/ bahan cetak spanduk kegiatan pembinaan pembentukan karakter bangsa bagi Ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	[-] belanja alat/ bahan cetak spanduk kegiatan pembinaan pembentukan karakter bangsa bagi Ormas					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	Spanduk Spesifikasi : Sapnduk	12 Meter	M2	90.000,00	-	1.080.000,00	0 Meter	M2	90.000,00	-	0,00	-1.080.000,00
	[#] Belanja cetak Spanduk pada Kegiatan Hari Ulang Tahun Bela Negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	[-] Belanja cetak Spanduk pada Kegiatan Hari Ulang Tahun Bela Negara					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	5 Meter x 4 Meter	M2	90.000,00	-	1.800.000,00	5 Meter x 4 Meter	M2	90.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					0,00					2.500.000,00	2.500.000,00
	[#] Belanja air galon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					2.500.000,00	2.500.000,00
	[-] belanja air galon					0,00					2.500.000,00	2.500.000,00
	Air Galon 19 liter (Isi Ulang) Spesifikasi : Air Galon 19 liter (Isi Ulang)	-	Galon	0,00	-	0,00	10 Galon x 10 Hari	Galon	25.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.706.000,00					1.020.000,00	-7.686.000,00
	[#] Belanja parcel buah kegiatan hari bela Negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					570.000,00					570.000,00	0,00
	[-] Belanja Parcel Buah Kegiatan Hari Bela Negara					570.000,00					570.000,00	0,00
	Parcel Buah Spesifikasi : Parcel Buah	3 Buah	Buah	190.000,00	-	570.000,00	3 Buah	Buah	190.000,00	-	570.000,00	0,00
	[#] Belanja Jajanan Pasar(nampan) Kegiatan Hari Bela Negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					450.000,00					450.000,00	0,00
	[-] Belanja Jajanan Pasar (nampan) kegiatan hari Bela Negara					450.000,00					450.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Bissa : Spesifikasi : Jajanan Pasar (nampan)	3 Buah	Pack	150.000,00	-	450.000,00	3 Buah	Pack	150.000,00	-	450.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.730.000,00					0,00	-2.730.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA					2.730.000,00					0,00	-2.730.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Bissa : Spesifikasi : Jamuan Snack	65 Box x 2 Kali	Orang / Kali	21.000,00	-	2.730.000,00	0 Box x 2 Kali	Orang / Kali	21.000,00	-	0,00	-2.730.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Pembentukan Karakter bangsa bagi Ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.310.000,00					0,00	-2.310.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Pembinaan Pembentukan Karakter bangsa bagi Ormas					2.310.000,00					0,00	-2.310.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa : Spesifikasi : Jamuan Snack	110 Box x 1 Kali	Orang / Kali	21.000,00	-	2.310.000,00	0 Box x 1 Kali	Orang / Kali	21.000,00	-	0,00	-2.310.000,00
	[#] Belanja Makanan dan minuman Rapat pada Kegiatan pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.646.000,00					0,00	-2.646.000,00
	[-] Belanja Makanan dan minuman Rapat pada Kegiatan pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA					2.646.000,00					0,00	-2.646.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa : Spesifikasi : Jamuan Snack	63 Box x 2 Kali	Orang / Kali	21.000,00	-	2.646.000,00	0 Box x 2 Kali	Orang / Kali	21.000,00	-	0,00	-2.646.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00					47.475.000,00	47.475.000,00
	[#] Jajanan Nampilan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					450.000,00	450.000,00
	[-] jajanan nampilan					0,00					450.000,00	450.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa : Spesifikasi : Jajanan Pesar (nampilan)	-	Pack	0,00	-	0,00	3 Pack	Pack	150.000,00	-	450.000,00	450.000,00
	[#] parcel buah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					825.000,00	825.000,00
	[-] parcel buah					0,00					825.000,00	825.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa : Spesifikasi : Parcel Buah Kecil	-	Pack	0,00	-	0,00	3 Pack	Pack	275.000,00	-	825.000,00	825.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Aktifitas Lapangan Pendidikan Karakter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					46.200.000,00	46.200.000,00
	[-] Belanja Makan Minum (Peserta) Pendidikan Karakter					0,00					35.700.000,00	35.700.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa : Spesifikasi : Jamuan Snack	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	85 Orang x 2 Kali x 10 Hari	Orang / Kali	21.000,00	-	35.700.000,00	35.700.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Snack Kegiatan Pendidikan Karakter					0,00					10.500.000,00	10.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa : Spesifikasi : Jamuan Snack	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	25 Orang x 2 Kali x 10 Hari	Orang / Kali	21.000,00	-	10.500.000,00	10.500.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					7.000.000,00					89.500.000,00	82.500.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Aktifitas Lapangan Kegiatan Hari Bela Negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman aktifitas Lapangan pada Kegiatan Hari Bela Negara					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00
	Jamuan Makan Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Jamuan Makan Aktivitas Lapangan	200 Box x 1 Kegiatan	Orang / Hari	35.000,00	-	7.000.000,00	200 Box x 1 Kegiatan	Orang / Hari	35.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan Minum (Pelatih/Instruktur) Pendidikan Karakter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					18.750.000,00	18.750.000,00
	[-] Belanja Makan Minum (Peserta) Pendidikan Karakter					0,00					18.750.000,00	18.750.000,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Nasi Bungkus	-	Per Bungkus	0,00	-	0,00	25 Orang x 3 Kali x 10 Hari	Per Bungkus	25.000,00	-	18.750.000,00	18.750.000,00
	[#] Belanja Makan Minum (Peserta) Pendidikan Karakter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					63.750.000,00	63.750.000,00
	[-] Belanja Makan Minum (Peserta) Pendidikan Karakter					0,00					63.750.000,00	63.750.000,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Nasi Bungkus	-	Per Bungkus	0,00	-	0,00	85 Orang x 3 Kali x 10	Per Bungkus	25.000,00	-	63.750.000,00	63.750.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaiian Dinas Lapangan (PDL)					0,00					63.750.000,00	63.750.000,00
	[#] Belanja Pakaiian Dinas (Tactical) Kegiatan Pendidikan Karakter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					63.750.000,00	63.750.000,00
	[-] Belanja Pakaiian Dinas Peserta Pendidikan Karakter					0,00					63.750.000,00	63.750.000,00
	Baju Kerja Lapangan Spesifikasi : Baju Kerja Lapangan	-	Stel	0,00	-	0,00	85 Orang	Stel	750.000,00	-	63.750.000,00	63.750.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaiian Olahraga					190.000.000,00					51.000.000,00	-49.000.000,00
	[#] Belanja Pakaiian Olah Raga Peserta Pendidikan Karakter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					51.000.000,00	51.000.000,00
	[-] Belanja Pakaiian Dinas Peserta Pendidikan Karakter					0,00					51.000.000,00	51.000.000,00
	Pakaiian Olah raga Spesifikasi : Pakaiian Olah raga	-	Stel	0,00	-	0,00	85 Orang	Stel	600.000,00	-	51.000.000,00	51.000.000,00
	[#] belanja pakaian olah raga kegiatan pembinaan bela negara peserta pelajar SLTA kota bekasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.000.000,00					0,00	-50.000.000,00
	[-] belanja pakaian olah raga kegiatan pembinaan bela negara peserta pelajar SLTA					50.000.000,00					0,00	-50.000.000,00
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	50 Orang	Stel	1.000.000,00	-	50.000.000,00	0 Orang	Stel	1.000.000,00	-	0,00	-50.000.000,00
	[#] belanja pakaian olah raga kegiatan pembinaan bela negara peserta guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.000.000,00					0,00	-50.000.000,00
	[-] belanja pakaian olah raga kegiatan pembinaan bela negara peserta guru SLTA					50.000.000,00					0,00	-50.000.000,00
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	50 Orang	Stel	1.000.000,00	-	50.000.000,00	0 Orang	Stel	1.000.000,00	-	0,00	-50.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					117.249.500,00					174.967.500,00	57.718.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					68.482.000,00					117.200.000,00	48.718.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					67.129.000,00					116.900.000,00	49.680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Instruktur pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.640.000,00					0,00	-8.640.000,00
	[-] Belanja Honorarium Instruktur pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara Guru SLTA					8.640.000,00					0,00	-8.640.000,00
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Spesifikasi : Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	6 Orang x 8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	45.000,00	-	8.640.000,00	0 Orang x 8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	45.000,00	-	0,00	-8.640.000,00
	[#] Belanja Honorarium Instruktur pada Kegiatan Pembinaan Pembentukan Karakter Bangsa bagi Ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.440.000,00					0,00	-1.440.000,00
	[-] Honorarium Instruktur pada Kegiatan Pembinaan Pembentukan Karakter Bangsa bagi Ormas					1.440.000,00					0,00	-1.440.000,00
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Spesifikasi : Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	2 Orang x 8 Jam x 2 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	45.000,00	-	1.440.000,00	0 Orang x 8 Jam x 2 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	45.000,00	-	0,00	-1.440.000,00

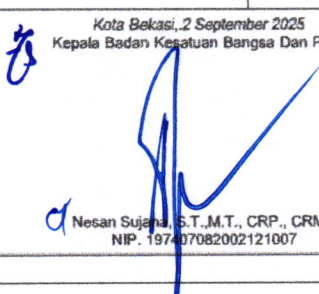
**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
[#]	Belanja Honorarium Instruktur pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.640.000,00					0,00	-8.640.000,00
[-]	Belanja Honorarium Instruktur pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA					8.640.000,00					0,00	-8.640.000,00
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Spesifikasi : Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	6 Orang x 8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	45.000,00	-	8.640.000,00	6 Orang x 8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	45.000,00	-	0,00	-8.640.000,00
[#]	Honorarium narasumber pembahaspejabat eselon II yang disetarakan pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.000.000,00					0,00	-16.000.000,00
[-]	Honorarium narasumber pembahaspejabat eselon II yang disetarakan pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA					16.000.000,00					0,00	-16.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	1.000.000,00	-	16.000.000,00	2 Orang x 2 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-16.000.000,00
[#]	Belanja Honorarium narasumber / pembahas eselon II yang disetarakan pada Kegiatan Pembinaan Karakter Bangsa bagi Ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.000.000,00					0,00	-8.000.000,00
[-]	Belanja Honorarium narasumber / pembahas eselon II yang disetarakan pada Kegiatan Pembinaan Karakter Bangsa bagi Ormas					8.000.000,00					0,00	-8.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	2 Orang x 2 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-8.000.000,00
[#]	Belanja Honorarium pembahas Kepala Daerah/ Pejabat setingkat Kepala daerah yang disetarakan pada kegiatan Pembinaan karakter Bangsa bagi ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.800.000,00					0,00	-2.800.000,00
[-]	Belanja Honorarium Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah yang disetarakan pada Kegiatan Pembentukan Karakter bangsa bagi Ormas					2.800.000,00					0,00	-2.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	2.800.000,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	0,00	-2.800.000,00
[#]	Honorarium kepala daerah / pejabat setingkat Kepala daerah yang disetarakan pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.800.000,00					0,00	-2.800.000,00
[-]	Honorarium Pembahas: Kepala daerah/Pejabat setingkat Kepala daerah Lainnya yang disetarakan pada Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA					2.800.000,00					0,00	-2.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	2.800.000,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	0,00	-2.800.000,00
[#]	Belanja Honorarium Kepala daerah/ Pejabat setingkat Kepala daerah yang disetarakan pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.800.000,00					0,00	-2.800.000,00
[-]	honorarium narasumber pembahas : Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala daerah yang disetarakan pada kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA					2.800.000,00					0,00	-2.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	2.800.000,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	0,00	-2.800.000,00
[#]	narasumber/Pemateri Keg. Pendidikan Karakter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					72.000.000,00	72.000.000,00
[-]	Uang harian perjalanan dinas keluar kota pada kegiatan duta bela negara					0,00					72.000.000,00	72.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	8 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	900.000,00	-	72.000.000,00	72.000.000,00
[#]	Instruktur Kegiatan Pendidikan Karakter Bagi Pelajar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					40.000.000,00	40.000.000,00
[-]	Uang harian perjalanan dinas keluar kota pada kegiatan duta bela negara					0,00					40.000.000,00	40.000.000,00
	Honor Instruktur Senam Protnis Spesifikasi : Honor Instruktur Senam Protnis	-	Bulan	0,00	-	0,00	10 Orang x 10 Hari	Bulan	400.000,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00
[#]	Honorarium Pengatur Barisan Hari Bela Negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00
[-]	Honorarium Pengatur Barisan Hari Bela Negara					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00
	Honorarium Pelugas Pengatur Barisan Spesifikasi : Honorarium Pelugas Pengatur Bendera	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	4 Orang	Orang / Kali	500.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
[#]	Honorarium narasumber Pembahasan pejabat eselon II yang disetara pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.000.000,00					0,00	-16.000.000,00
[-]	Honorarium narasumber Pembahasan pejabat eselon II yang disetara pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi guru SLTA					16.000.000,00					0,00	-16.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	1.000.000,00	-	16.000.000,00	2 Orang x 2 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-16.000.000,00
[#]	uang harian perjalanan perjalanan dinas ke DKI pada Kegiatan Pembentukan karakter Bela Negara bagi Ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					2.800.000,00	2.800.000,00
[-]	honorarium narasumber pembahas : Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala daerah yang disetarakan pada kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA					0,00					2.800.000,00	2.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	2.800.000,00	2.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					0,00					400.000,00	400.000,00
	[#] Honorarium Pembaca Doa Hari Bela Negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					400.000,00	400.000,00
	[-] Honorarium Pembaca Doa Hari Bela Negara					0,00					400.000,00	400.000,00
	Biaya Pembaca Doa/Rohaniawan - Tingkat Kota Spesifikasi : Biaya Pembaca Doa/Rohaniawan - Tingkat Kota	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					1.362.000,00					0,00	-1.362.000,00
	[#] Belanja Jasa Jalan Tol pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					454.000,00					0,00	-454.000,00
	[-] Belanja Jasa Jalan Tol pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA					454.000,00					0,00	-454.000,00
	BIAYA JASA JALAN/TOL : Spesifikasi : Belanja Jasa Jalan/Tol ke Bandung/Gimahi/ Purwakarta/Subang	2 pp	pp	227.000,00	-	454.000,00	0 pp	pp	227.000,00	-	0,00	-454.000,00
	[#] Belanja Jasa Jalan Tol pada Kegiatan Duta Bela Negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					454.000,00					0,00	-454.000,00

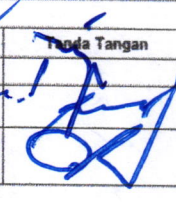
**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Jasa Jalan Tol pada Kegiatan Duta Bela Negara					454.000,00					0,00	-454.000,00
	BIAYA JASA JALAN/TOL : Spesifikasi : Belanja Jasa Jalan/Tol ke Bandung/Cimahi/ Purwakarta/Subang	2 pp	pp	227.000,00	-	454.000,00	0 pp	pp	227.000,00	-	0,00	-454.000,00
	[#] Belanja Jasa Jalan Tol pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					227.000,00					0,00	-227.000,00
	[-] Belanja jasa jalan tol pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA					227.000,00					0,00	-227.000,00
	BIAYA JASA JALAN/TOL : Spesifikasi : Belanja Jasa Jalan/Tol ke Bandung/Cimahi/ Purwakarta/Subang	1 pp	pp	227.000,00	-	227.000,00	0 pp	pp	227.000,00	-	0,00	-227.000,00
	[#] Belanja Jasa Jalan tol pada Kegiatan Pembinaan Pembentukan Karakter Bangsa bagi ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					227.000,00					0,00	-227.000,00
	[-] belanja jasa tol pada kegiatan Pembentukan karakter bangsa bagi Ormas					227.000,00					0,00	-227.000,00
	BIAYA JASA JALAN/TOL : Spesifikasi : Belanja Jasa Jalan/Tol ke Bandung/Cimahi/ Purwakarta/Subang	1 pp	pp	227.000,00	-	227.000,00	0 pp	pp	227.000,00	-	0,00	-227.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					47.500.000,00					3.500.000,00	-44.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					44.000.000,00					0,00	-44.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.000.000,00					0,00	-11.000.000,00
	[-] belanja sewa kendaraan kegiatan pembinaan bela negara bagi guru SLTA					11.000.000,00					0,00	-11.000.000,00
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar jarak 100 s/d 200km	1 Unit x 2 Hari	Hari	5.500.000,00	-	11.000.000,00	0 Unit x 2 Hari	Hari	5.500.000,00	-	0,00	-11.000.000,00
	[#] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang pada Kegiatan Pembentukan Karakter Bangsa bagi Ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.000.000,00					0,00	-22.000.000,00
	[-] belanja sewa kendaraan pembinaan pembentukan karakter bangsa bagi Ormas					22.000.000,00					0,00	-22.000.000,00
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar jarak 100 s/d 200km	2 Unit x 2 Hari	Hari	5.500.000,00	-	22.000.000,00	0 Unit x 2 Hari	Hari	5.500.000,00	-	0,00	-22.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Penumpang pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.000.000,00					0,00	-11.000.000,00
	[-] belanja sewa kendaraan kegiatan pembinaan bela negara bagi pelajar SLTA					11.000.000,00					0,00	-11.000.000,00
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar jarak 100 s/d 200km	1 Unit x 2 Hari	Hari	5.500.000,00	-	11.000.000,00	0 Unit x 2 Hari	Hari	5.500.000,00	-	0,00	-11.000.000,00
5.1.02.02.04.0119	Belanja Sewa Mebel					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Kursi kegiatan hari bela Negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	[-] Belanja sewa kursi kegiatan hari bela Negara					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	Sewa Kursi Spesifikasi : Sewa Kursi	200 Unit	Unit	11.000,00	-	2.200.000,00	200 Unit	Unit	11.000,00	-	2.200.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					1.300.000,00					1.300.000,00	0,00
	[#] sewa tenda kegiatan hari bela negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.300.000,00					1.300.000,00	0,00
	[-] Belanja sewa tenda kegiatan hari bela Negara					1.300.000,00					1.300.000,00	0,00
	Sewa Tenda Partisi 3 X 3 M2 Spesifikasi : Belanja Sewa Tenda Partisi 3 X 3 M2	2 Buah	Buah	650.000,00	-	1.300.000,00	2 Buah	Buah	650.000,00	-	1.300.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					1.267.500,00					54.267.500,00	53.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0,00					53.000.000,00	53.000.000,00
	[#] Spesifikasi Sewa Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					18.000.000,00	18.000.000,00
	[-] Spesifikasi Sewa Ruang Pertemuan					0,00					18.000.000,00	18.000.000,00
	Belanja Sewa Ruangan Kapasitas 70 Orang Spesifikasi : Sewa Ruangan (Kapasitas 70 Orang)	-	Hari	0,00	-	0,00	10 Hari	Hari	1.800.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00
	[#] Sewa Tempat Kapasitas 85 orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
	[-] Sewa tempat kapasitas 85 orang					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
	Sewa Ruangan (sampai dengan 50 orang) Spesifikasi : Sewa Ruangan (sampai dengan 50 orang)	-	Hari	0,00	-	0,00	10 Hari	Hari	3.500.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					1.267.500,00					1.267.500,00	0,00
	[#] sewa Taman Kegiatan Hari Bela Negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.267.500,00					1.267.500,00	0,00
	[-] belanja sewa taman kegiatan hari bela negara					1.267.500,00					1.267.500,00	0,00
	Sewa Taman Spesifikasi : Sewa Taman	3 Meter	M2 Per Hari	422.500,00	-	1.267.500,00	3 Meter	M2 Per Hari	422.500,00	-	1.267.500,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					653.264.900,00					55.250.000,00	-598.014.900,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					653.264.900,00					55.250.000,00	-598.014.900,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					7.740.000,00					0,00	-7.740.000,00
	[#] Belanja uang harian perjalanan Dinas Luar Kota pada Kegiatan Pembentukan Karakter Bangsa bagi Ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.290.000,00					0,00	-1.290.000,00
	[-] Belanja uang harian perjalanan Dinas Luar Kota pada Kegiatan Pembentukan Karakter Bangsa bagi Ormas					1.290.000,00					0,00	-1.290.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Luar Kota : Spesifikasi : Jawa Barat	3 Orang x 1 pp	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0 Orang x 1 pp	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-1.290.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Keluar Kota pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.580.000,00					0,00	-2.580.000,00
	[-] belanja uang harian perjalanan dinas keluar kota kegiatan pembinaan bela negara bagi pelajar SLTA					2.580.000,00					0,00	-2.580.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Luar Kota : Spesifikasi : Jawa Barat	3 Orang x 2 pp	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	0 Orang x 2 pp	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-2.580.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja uang harian perjalanan Dinas keluar kota pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.290.000,00					0,00	-1.290.000,00
	[-] Belanja uang harian perjalanan Dinas keluar kota pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA					1.290.000,00					0,00	-1.290.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Luar Kota : Spesifikasi : Jawa Barat	3 Orang x 1 pp	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0 Orang x 1 pp	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-1.290.000,00
	[#] Uang harian perjalanan dinas keluar kota pada kegiatan duta bela negara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.580.000,00					0,00	-2.580.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas keluar kota pada kegiatan duta bela negara					2.580.000,00					0,00	-2.580.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Luar Kota : Spesifikasi : Jawa Barat	3 Orang x 2 pp	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	0 Orang x 2 pp	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-2.580.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0,00					55.250.000,00	55.250.000,00
	[#] narasumber pendidikan Karakter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					55.250.000,00	55.250.000,00
	[-] uang harian peserta kegiatan pendidikan karakter					0,00					55.250.000,00	55.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Diklat : Spesifikasi : Jawa Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	85 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	55.250.000,00	55.250.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					645.524.000,00					0,00	-645.524.000,00
	[#] Belanja Uang harian rapat/ pertemuan (fullbord di dalam/ luar kota) Jawa Barat pada Kegiatan Pembentukan Karakter Bangsa bagi Ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24.700.000,00					0,00	-24.700.000,00
	[-] uang harian rapat/pertemuan (fullbord di luar kota/ dalam kota) pada Kegiatan Pembentukan Karakter Bangsa bagi Ormas					24.700.000,00					0,00	-24.700.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Spesifikasi : Fullboard	95 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	24.700.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	0,00	-24.700.000,00
	[#] Belanja Paket Fullbord setingkat eselon III kebawah pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					197.280.000,00					0,00	-197.280.000,00
	[-] Paket Fullboard setingkat eselon III kebawah pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA					197.280.000,00					0,00	-197.280.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Ke Bawah : Fullboard : Spesifikasi : Jawa Barat	60 Orang x 4 Hari	Orang / Paket	822.000,00	-	197.280.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Paket	822.000,00	-	0,00	-197.280.000,00
	[#] Belanja Paket Fullbord setingkat eselon III kebawah pada Kegiatan Pembentukan Karakter Kebangsaan bagi Ormas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					174.264.000,00					0,00	-174.264.000,00
	[-] Belanja Paket Fullbord setingkat eselon III kebawah pada Kegiatan Pembentukan Karakter Kebangsaan bagi Ormas					174.264.000,00					0,00	-174.264.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Ke Bawah : Fullboard : Spesifikasi : Jawa Barat	108 Orang x 2 Hari	Orang / Paket	822.000,00	-	174.264.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Paket	822.000,00	-	0,00	-174.264.000,00
	[#] Belanja Paket Fullbord setingkat eselon III kebawah pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					197.280.000,00					0,00	-197.280.000,00
	[-] Paket Fullbord setingkat eselon III kebawah pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA					197.280.000,00					0,00	-197.280.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Ke Bawah : Fullboard : Spesifikasi : Jawa Barat	60 Orang x 4 Hari	Orang / Paket	822.000,00	-	197.280.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Paket	822.000,00	-	0,00	-197.280.000,00
	[#] Belanja uang harian rapat/pertemuan (fullbord didalam/ luar kota) pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.000.000,00					0,00	-26.000.000,00
	[-] Belanja uang harian rapat/pertemuan (fullbord didalam/ luar kota) pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Pelajar SLTA					26.000.000,00					0,00	-26.000.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Spesifikasi : Fullboard	50 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	26.000.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	0,00	-26.000.000,00
	[#] Uang harian rapat/pertemuan (fullbord didalam/ luar Kota) pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.000.000,00					0,00	-26.000.000,00
	[-] Belanja Uang harian rapat/ pertemuan (fullbord didalam/ luar kota) pada Kegiatan Pembinaan Bela Negara bagi Guru SLTA					26.000.000,00					0,00	-26.000.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Spesifikasi : Fullboard	50 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	26.000.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	0,00	-26.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						896.130.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				500.000.000,00	-396.130.000,00
							Kota Bekasi, 2 September 2025 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  Nesan Sujana, S.T., M.T., CRP., CRMP NIP. 197407082002121007					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. DINAR FAIZAL BADAR	197101151990031002	Kepala BAPPELITBANGDA	
2	RULLY CHAIRUL, S.E., M.A	198005062006041018	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	
3	SAUT HUTAJULU, A.Md. LLAJ, S.E., M.Si.	197110251996031003	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	